Drilling Soal-soal Tes Masuk

- ★ Sekilas Tentang POLRI
- ★ Panduan Seleksi Masuk POLRI
- ★ Tip dan Trik Lulus Tes Masuk POLRI
- ★ Daftar Sinonim dan Antonim Kata
- ★ Rumus-rumus Matematika
- ★ Paket Tes Psikotes
  - ★ Tes Kecerdasan Numerik
  - ★ Tes Kemampuan Verbal
  - ★ Tes Kecermatan
  - ★ Tes Kepribadian
- ★ Paket Tes Akademik
  - ★ Tes Kemampuan Bahasa Inggris
  - ★ Tes Pengetahuan Umum
  - ★ Tes Kemampuan Bahasa Indonesia

Risky Wulandari

Passion for Knowledge

DRILLING SOAL-SOAL TES MASUK POLRI

Oleh:
Risky Wulandari

Drilling Soal-Soal Tes Masuk POLRI

Oleh Risky Wulandari

ISBN: 978-602-394-835-2
E-ISBN: 978-602-483-873-7
Penyunting: Saptono Raharjo
Desain Isi: Nurhasanah Ridwan
Desain cover: Amanda M. T. Castilani

Jln. Palmerah Barat 29-37, Unit 1 - Lantai 2
Jakarta 10270

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit Bhuana Ilmu Populer
Kelompok Gramedia
No. Anggota IKAPI: 246/DKI/04

Diterbitkan oleh Penerbit Bhuana Ilmu populer
Jakarta, 2017

Daftar Isi

Kata Pengantar viii

Sekilas Tentang POLRI 1

- Tugas dan Wewenang Polri 1
- Organisasi Polri 3
- Unsur Pimpinan 4
- Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan 4
- Unsur Pelaksana Tugas Pokok 5
- Unsur Pendukung 5
- Polda 7
- Struktur wilayah 8

Panduan Seleksi Masuk POLRI 9

- Berkarier di Polisi dengan Masuk AKPOL 10

Tip Trik Diterima Menjadi Polisi atau POLRI 13

- Penuhi persyaratan umum 13
- Melengkapi Berkas 13
- Seleksi Administrasi 14
- Seleksi Psikologi 14
- Seleksi Kesehatan Pertama 14

- Seleksi Kemampuan Jasmani & Kesemaptaan 14
- Test Kemampuan Kompetensi 14
- Seleksi Kesehatan Kedua 15
- Rapat Kelulusan 15
- Berdoa 15
- Pengumuman Kelulusan 15

Sinonim Kata **16**

Antonim Kata **21**

Rumus-Rumus Matematika **24**

- Rumus Kecepatan Sesat dan Kecepatan Rata-Rata 24
- Rumus Percepatan 24
- Rumus Deret Hitung 24
- Kesetaraan Satuan-Satuan Masa 25
- Kesetaraan Satuan-Satuan Volume 25
- Kesetaraan Satuan-Satuan Luas 25
- Kesetaraan Satuan Buah 25
- Kesetaraan Satuan Waktu 25
- Keteraan Nilai Pecahan Bias, Pecahan Desimal, dan Persen 25

PAKET TES PSIKOTES **26**

Tes Kecerdasan Numerik **26**

- Deret Angka 26
- Pembahasan Soal Deret Angka 31
- Matematika Cerita 34
- Pembahasan Soal Matematika Cerita 43
- Matematika Aljabar 51
- Pembahasan Soal Matematika Aljabar 55

Tes Penalaran **61**

- Penalaran Simbol 61
- Kunci Jawaban Soal Penalaran Simbol 67
- Penalaran Gambar 68
- Pembahasan Soal Penalaran Gambar 71

Tes Kemampuan Verbal **73**
- Sinonim 73
- Pembahasan Soal Sinonim 78
- Antonim 82
- Pembahasan Soal Antonim 87
- Analogi 91
- Pembahasan Soal Analogi 93

Tes Kecermatan **95**
- Angka Hilang 95
- Pembahasan Soal Angka Hilang 98
- Huruf Hilang 101
- Pembahasan Soal Huruf Hilang 102
- Simbol Hilang 104
- Pembahasan Soal Simbol Hilang 105

Tes Minat Epps **107**

Tes Kepribadian **112**
- Tes Kraepelin 112

Tes Menggambar Orang **114**
- Contoh Hasil 114

PAKET TES AKADEMIK **118**

Paket Tes Akademik **118**
- Tes Kemampuan Bahasa Inggris 118
- Pembahasan Soal Kemampuan Bahasa Inggris 129
- Tes Pengetahuan Umum 134
- Pembahasan Tes Pengetahuan Umum 140
- Tes Kemampuan Bahasa Indonesia 144
- Pembahasan Tes Kemampuan Bahasa Indonesia 152

Tentang Penulis **156**

Daftar Pustaka **157**

Kata Pengantar

Mengabdi menjadi polisi merupakan salah satu impian dari kebanyakan orang. Namun, untuk bisa menjadi polisi harus melalui serangkaian proses seleksi. Tidak sedikit dari mereka yang gagal menghadapi seleksi, bukan karena tidak mampu melainkan kurang adanya persiapan.

Untuk bisa menjadi polisi, harus mengikuti serangkaian tes seperti pemeriksaan administrasi awal sekaligus pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan kesehatan, tes psikotes dan tes akademik. Salah satu tes yang dirasa paling berat adalah tes tertulis. Tes tertulis terdiri dari tes psikotes dan kemampuan akademik. Mengapa tes tertulis dirasa paling berat? Hal ini biasanya dikarenakan peserta tes merasa asing dengan soal-soal yang diujikan. Sayang sekali jika peserta harus gagal karena tidak bisa mengerjakan tes psikotes dan akademik. Padahal jika mereka mengetahui strategi dalam menghadapi tes psikotes dan akademik semua akan terasa mudah.

Drilling Soal-Soal Tes Masuk POLRI merupakan buku yang dirancang untuk membantu para calon peserta tes masuk POLRI dalam mengenal soal-soal tes masuk polri dan mengukur kemampuan akademiknya. Sehingga calon peserta mengetahui tingkat kesiapan, kemampuan dan strategi dalam bersaing agar bisa lolos tes masuk POLRI.

Drilling Soal-Soal Tes Masuk POLRI berisi informasi terkait profil POLRI, tahapan seleksi, tip dan trik lolos menjadi POLRI, rangkuman materi, latihan soal psikotes beserta pembahasannya yang terdiri dari tes numerik, kemampuan verbal, kecermatan dan kepribadian. Selain latihan soal psikotes juga berisi latihan tes akademik beserta pembahasannya. Adapun latihan tes akademik terdiri dari tes bahasa Inggris, pengetahuan umum dan bahasa Indonesia.

Akhir kata, terimakasih kepada tim redaksi Bhuana Ilmu Populer yang telah menerbitkan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi mereka yang akan menghadapi tes masuk POLRI.

Selamat Berjuang!

Risky Wulandari

Sekilas Tentang POLRI

Mengabdi menjadi Polisi mungkin merupakan cita-cita sebagian banyak orang. Mengapa harus menjadi polisi? Setiap orang yang bercita-cita menjadi seorang Brigadir Polisi pasti memiliki alasan yang berbeda-beda.

Gambar Logo Emblem Mabes POLRI
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Sebelum memutuskan untuk menjadi seorang Brigadir Polisi, alangkah baiknya Anda mengetahui lebih dulu seluk-beluk Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik terkait tugas pokok, wewenang, keorganisasian, maupun tingkatan pangkat.

Tugas dan Wewenang Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Tugas–tugas kepolisian meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sejak 13 Juli 2016 jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; serta
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Organisasi Polri

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan, yaitu:

1. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Mabes Polri**);
2. Organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (**Polda**) di tingkat provinsi;
3. Organisasi di tingkat kabupaten disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (**Polres**); dan

4. Organisasi di wilayah kecamatan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (**Polsek**).

Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Kapolri**). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Kepala Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi.

Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Unsur-Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan terdiri dari:

1. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organsiasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri.
2. Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya.
3. Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri.
4. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri.
5. Asisten Kapolri Sarana dan Prasarana (Assarpras), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi sarana dan prasarana dalam lingkungan Polri.
6. Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal.
7. Divisi Hukum (Div Kum). Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas)
8. Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter), adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang ada dibawah Kapolri. Bagian ini membawahi *National Crime Bureau Interpol* (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan internasional.
9. Divisi Teknologi Informasi Kepolisian (Div TI Pol), adalah unsur pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika.
10. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim),

11. Sekretariat Umum (Kasetum),
12. Pelayanan Markas (Kayanma),
13. Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.

Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari:

1. Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.
2. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal (Komjen).
3. Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.
4. Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri.
5. Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya.
6. Biro Operasi Polri, bertugas untuk mengirimkan pasukan Brimob, Sabhara, Samapta, Satlantas, (Jihandak/Penjinak Bahan Peledak, bila diperlukan) serta sebuah tim intelijen jika ada demonstrasi, sidang pengadilan, pertemuan tingkat tinggi, perayaan hari besar oleh kelompok masyarakat, atau peresmian oleh kepala pemerintahan, kepala negara, ketua MPR, atau ketua DPR dengan mengirimkan surat tugas kepada Biro Operasi Polda setempat, Biro Operasi Polres setempat, dan Polsek setempat.
7. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Unsur Pendukung

Unsur Pendukung, terdiri dari:

- Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol), bertugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pen-

didikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Lembaga ini membawahi:

- ◊ Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri. Terdiri dari Sespinma (dahulu Selapa), Sespimmen (dahulu Sespim) dan Sespimti (dahulu Sespati).
- ◊ Akademi Kepolisian (Akpol), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri. Gubernur Akpol dipegang oleh Irjen Pol Anas Yusuf.
- ◊ Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian
- ◊ Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA)
- ◊ Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS)
- ◊ Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari:
  - Pendidikan dan Latihan Khusus Kejahatan dan Kekerasaan (Diklatsus Jatanras).
  - Pusdik Intelijen (Pusdikintel).
  - Pusdik Reserse Kriminal (Pusdikreskrim).
  - Pusdik Lalulintas (Pusdiklantas).
  - Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum).
  - Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob).
  - Pusdik Kepolisian Perairan (Pusdikpolair).
  - Pusdik Administrasi (Pusdikmin).
  - Sekolah Bahasa (Sebasa).
  - Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan).
  - Pusdik Bina Masyarakat (Pusdikbinmas),
  - Pusat Logistik dan Perbekalan Polri dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
  - Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen), termasuk di dalamnya adalah Rumah Sakit Pusat Polri (Rumkit Puspol) yang juga dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
  - Pusat Keuangan (Puskeu Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
  - Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang Polri) yang akan dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen).
  - Pusat Sejarah (Pusjarah Polri) yang akan dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen).

Polda

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

1. Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat satu Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen).
   - ◊ Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi.
2. Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).
   - ◊ Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten.
3. Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kompol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Ipda).
   - ◊ Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu:

1. Direktorat Reserse Kriminal:
   - ◊ Subdit Kriminal Umum.
   - ◊ Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras).
   - ◊ Subdit Remaja Anak dan Wanita.
   - ◊ Unit Inafis *(Indonesia Automatic Finger Print Identification System)/ Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara).*
2. Direktorat Reserse Kriminal Khusus:
   - ◊ Subdit Tindak Pidana Korupsi.
   - ◊ Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah).
   - ◊ Subdit *Cyber Crime*.
3. Direktorat Reserse Narkoba:
   - ◊ Subdit Narkotika.
   - ◊ Subdit Psikotropika.
4. Direktorat Intelijen dan Keamanan.
5. Direktorat Lalu Lintas:
   - ◊ Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa).

- ◊ Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident).
- ◊ Subdit Penegakan Hukum (Gakkum).
- ◊ Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel).
- ◊ Subdit Patroli Pengawalan (Patwal).
- ◊ Subdit Patroli Jalan Raya (PJR).

6. Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra).
7. Direktorat Sabhara.
8. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit).
9. Direktorat Polisi Air (Polair).
10. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti).
11. Biro Operasi.
12. Biro SDM.
13. Biro Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik).
14. Bidang Keuangan.
15. Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).
16. Bidang Hukum.
17. Bidang Hubungan Masyarakat.
18. Bidang Kedokteran Kesehatan.

Struktur wilayah

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

1. Pusat:
   - ◊ Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
2. Wilayah Provinsi:
   - ◊ Kepolisian Daerah (Polda).
3. Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resort:
   - ◊ Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes).
   - ◊ Kepolisian Resort Kota (Polresta).
   - ◊ Kepolisian Resort Kabupaten (Polres).
4. Tingkat kecamatan Kepolisian sektor:
   - ◊ Kepolisian Sektor Kota (Polsekta).
   - ◊ Kepolisian Sektor (Polsek).

Wilayah hukum dari Kepolisian Wilayah (Polwil) adalah kawasan yang pada masa kolonial merupakan Karesidenan. Karena wilayah seperti ini umumnya hanya ada di Pulau Jawa, maka di luar Jawa tidak dikenal adanya satuan berupa Polwil kecuali untuk wilayah perkotaan seperti ibukota provinsi seperti misalnya Polwiltabes Makassar di Sulawesi Selatan. Mulai awal 2010 seluruh Kepolisian Wilayah (Polwil) di Pulau Jawa sudah dihapus. Di beberapa daerah terpencil, ada pula pos-pos polisi yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian Sektor.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)

Panduan Seleksi Masuk POLRI

Masuk dan mendaftar menjadi polisi bisa melalui jalur-jalur berikut, yaitu:

1. Sekolah Calon Bintara (Secaba) Polisi

Sekolah Calon Bintara diperuntukan untuk lulusan SMA dan sederajat. Mereka yang telah lolos seleksi akan mendapat pendidikan selama tujuh bulan di sekolah polisi negara (SPN). Sekolah polisi negara ada di Polda di daerah masing-masing. Saat lulus dari SPN akan berpangkat brigadir dua (bripda).

2. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS)

Untuk masuk ke Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjan (SIPSS), syaratnya harus sudah lulus sarjana.

Anda akan dididik di sekolah pembentukan perwira (sektukpa) di lembaga pendidikan Polri (Lemdikpol) selama enam bulan, untuk masuk ke SIPSS. Saat lulus nanti Anda mendapatkan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda).

3. Akademi Kepolisian (AKPOL)

Jalur lainnya yang bisa dicoba adalah dengan masuk akademi polisi saat lulus SMA dan mengikuti pendidikan selama empat tahun di Akpol Semarang. Saat lulus, Anda berpendidikan sarjana ilmu kepolisian dan berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda).

4. Tamtama Polisi/ Tamtama Brimob

Tamtama Polisi atau Brimob ditempuh selama enam bulan di SPN Polda dan keluar dengan pangkat Bharada Polisi. Sebelumnya Anda harus lulusan SMA/sederajat terlebih dahulu.

Berkarier di Polisi dengan Masuk AKPOL

Bila Anda memutuskan berkarier di kepolisian, jalur AKPOL adalah yang paling direkomendasikan karena kemungkinan karier melejit akan lebih besar dibanding jalur masuk lainnya. Selain mendapatkan pangkat lebih tinggi dibanding lulusan Secaba, lulusan AKPOL akan lebih mudah mendapatkan posisi dan pangkat tertinggi hingga pensiun nanti.

Bagaimana dengan SIPSS? Apa perbedaan Akpol dan SIPSS, karena keduanya mendapatkan pangkat yang sama? Lulusan Akpol dipersiapkan untuk calon pemimpin polisi ke depan sehingga jabatannya lebih ke struktural, sementara lulusan SIPSS akan ditempatkan sebagai ahli di bidangnya.

Adapun persyaratan untuk mendaftar menajdi Polisi, yaitu:

Persyaratan Umum

1. warga Negara Indonesia (pria atau wanita);
2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;
4. pendidikan paling rendah SMU/sederajat;
5. usia min 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota polri);
6. sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan);
7. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari polres setempat;
8. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; serta
9. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Persyaratan Khusus:

1. pria/wanita, bukan anggota/mantan Polri/TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI;
2. berusia minimal 17 tahun (kelahiran 4 Agustus 2000) dan maksimal 21 tahun (kelahiran 4 Agustus 1996) pada saat pembukaan pendidikan;
3. untuk persyaratan nilai kelulusan tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 dengan nilai hasil ujian akhir nasional (HUAN) untuk IPA dan IPS min 6,5 (enam koma lima);
4. berijazah serendah-rendahnya SMA/ Madrasah Aliyah jurusan IPA/IPS (bukan lulusan Paket A, B, dan C) dengan ketentuan:
   a. nilai kelulusan tahun 2012 dan 2013 dengan Hasil Ujian Nasional/HUAN (bukan nilai gabungan) minimal 7,0 dan untuk tahun 2014, 2015, dan 2016 berdasarkan Ujian Nasional (UN) minimal 70, khusus Papua dan Papua Barat lulusan tahun 2012 s.d. 2017 minimal 65, dan
   b. bagi lulusan tahun 2017 (yang masih kelas III) nilai rapor rata-rata kelas III semester I minimal 70 dan

setelah lulus menyerahkan dengan nilai Ujian Nasional minimal 70

5. bukan merupakan lulusan program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C;
6. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
   a. pria: 165 cm; dan
   b. wanita: 160 cm.
7. berdomisili satu tahun di wilayah Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili dari Lurah/Kades setempat dengan diketahui oleh Kapolsek;
8. bagi Catar dari SMA Taruna Nusantara dan Krida Nusantara yang masih kelas III dapat mendaftar di Polda seluruh wilayah NKRI, sedangkan untuk lulusan dari tahun 2016 kebawah mendaftar sesuai domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah/kawin selama dalam pendidikan akpol, belum pernah melahirkan bagi catar wanita dan belum pernah punya anak kandung/biologis bagi catar pria;
10. tidak bertato/memiliki bekas tato dan tidak ditindik/memiliki bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
11. dinyatakan bebas narkoba dengan menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi kesehatan pemerintah (RS Pemerintah atau Klinik BNN/BNP/BNK);
12. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian;
13. bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kemenbuddikdasmen;
14. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri;
15. memperoleh persetujuan dari orangtua/wali;
16. tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan instansi lain;
17. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:
    a. mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan, dan
    b. bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan taruna akpol.
18. bagi yang memiliki prestasi di tingkat provinsi/nasional/internasional agar dilampirkan sertifikatnya untuk dijadikan pertimbangan dalam penentuan kelulusan;
19. mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian tingkat Panda dengan sistem gugur, yang meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai berikut:
    a. pemeriksaan administrasi awal;
    b. pemeriksaan kesehatan tahap I;
    c. pemeriksaan psikologi (tertulis);

d. pengujian akademik, yang meliputi:
   - Pengetahuan Umum;
   - Bahasa Indonesia;
   - Bahasa Inggris;
   - pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa);
   - pengujian kesamaptaan jasmani dan antropometri;
   - pendalaman PMK;
   - pemeriksaan Administrasi Akhir;
   - sidang terbuka kelulusan tingkat panda;

20. mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian tingkat Panpus dengan sistem gugur, yang meliputi materi dan urutan kegiatan sebagai berikut:
    a. sistem gugur meliputi:
       - Pemeriksaan Administrasi;
       - Pemeriksaan Kesehatan;
       - Pemeriksaan Psikologi Wawancara dan Pendalaman PMK, dan
       - Pengujian Jasmani dan Antropometri;
    b. sistem ranking;
       - uji TPA dan TOEFL;
       - Pemeriksaan Penampilan;
       - Sidang Terbuka Kelulusan Tingkat Akhir Pusat.

Untuk pelaksanaan pendaftaran seperti tahun lalu dilaksanakan dengan ***sistem online*** *dengan mengakses* ***website resmi penerimaan Polri****. Pendaftaran online: penerimaan.polri.go.id*

Tip Trik Diterima Menjadi Polisi atau POLRI

Penuhi persyaratan umum

1. Warga Negara Indonesia (Pria dan Wanita).
2. Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan dari institusi kesehatan).
5. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (Surat keterangan dari Poltabes/Poires/Ta setempat).
6. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
7. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas pokok Polri.

Melengkapi Berkas

Anda harus teliti menyiapkan kelengkapan berkas administrasi yang harus di penuhi oleh peserta calon anggota polri. Adapun syarat administrasi yang harus di lengkapi, biasanya sudah disediakan blangko pendaftaran oleh Panda yang terdiri dari: Surat Permohonan Menjadi Anggota Polri; Surat Keterangan Belum Menikah; Surat Kesediaan Ditempatkan di Seluruh Wilayah Indonesia; serta syarat-syarat yang harus di legalisir seperti Ijazah SD, SMP, SMA sampai PT, dan masih banyak lagi. Jangan lupa menyertakan surat-surat asli baik Ijazah, atau surat-surat kelengkapan lainnya yang sudah di jelaskan di atas un-

tuk memudahkan pemeriksaan Kelengkapan Administrasi oleh Panda.

Seleksi Administrasi

Dalam tahapan ini para peserta calon anggota Polri akan dicek kelengkapan Berkas Administrasi satu persatu oleh tim Pemeriksaan Administrasi oleh Panda dan Tim Independent (diknas selaku pemeriksa Ijazah).

Tim Pemeriksa kelengkapan Berkas Administrasi akan memeriksa dengan cermat dan teliti seperti pemeriksaan ijazah yang juga dilengkapi dengan alat pendeteksi Ijazah palsu. Dalam tahapan ini bagi yang belum lengkap biasanya masih ada kesempatan waktu untuk melengkapinya dengan catatan 1 x 24 jam tergantung kebijaksanaan masing-masing Panda penerimaan Calon Anggota Polri.

Seleksi Psikologi

Kalau dinyatakan lulus Seleksi Administrasi sudah tentu Anda masuk ke dalam Seleksi berikutnya yaitu seleksi psikologi. Di tahap ini yang dinilai adalah tingkat IQ, sifat, serta Kepribadian Anda sehari-hari. Dalam tes ini hampir 1/3 dari calon anggota Polri akan digugurkan, dalam artian di seleksi mana yang "berkompeten atau tidak" dalam tes ini.

Seleksi Kesehatan Pertama

Setelah dinyatakan lulus dari Tes Psikologi, maka selanjutnya adalah Seleksi Kesehatan. Dalam hal ini anda di Periksa Kesehatan baik Fisik, Pemeriksaan Penunjang, serta Pemeriksaan khusus. Kalau diuraikan akan menjadi seperti ini:

1. Pemeriksaan Fisik seperti keadaan umum dan keadaan spesifik. Untuk wanita biasanya dilakukan pemeriksaan *hymen* (cek virginitas) dan tes kehamilan.
2. Pemeriksaan Penunjang, seperti cek urine, darah, radiologi, EKG apabila diperlukan.
3. Pemeriksaan Khusus (Narkoba)

Seleksi Kemampuan Jasmani & Kesemaptaan

Apabila dinyatakan lulus dalam seleksi Kesehatan, maka Anda sudah menjalani paling tidak 75% dari keseluruhan tes calon anggota polri. Tahapan berikutnya adalah Seleksi Kemampuan Jasmani dan Kesemaptaan.

Dalam tes Kemampuan Jasmani dan Kesemaptaan meliputi;

1. Kelainan postur tubuh (*Antrophometrik*) seperti Menentukan tipe tubuh dan kelainan-kelainan bagian tubuh.
2. Tes Kesemaptaan seperti Lari 12 Menit, *Pull Up*, *Sit Up*, *Push Up* dilakukan selama satu Menit, serta yang terakhir *shuttle Run* jarak 6 x 10 meter.
3. Tes Berenang sejauh 25 meter.

Test Kemampuan Kompetensi

Setelah perjuangan yang melelahkan dengan tes kesemaptaan dan dinyatakan lulus, Anda kemudian di genjot lagi dalam tes kompetensi. Tes ini menguji kemampuan